Jurnal Akuntansi Manajemen Madani **ISSN 2580-2631**
Vol. 1, No. 1, Juni 2017

PENGARUH REALISASI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME, RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN, DAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TERHADAP REALISASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

Sinta
Rudy Pudjut Harianto

STIE Madani Balikpapan

ABSTRACT

Local Revenue from Local Taxes and Local Retributions is expected to increase regional revenue. So with the revenue generated by the region expected to be used / realized in accordance with the needs of the government to realize the capital expenditure. The purpose of this study was to determine the effect of local tax (hotel tax, restaurant tax, advertisement tax) and retributions (retributionsi cleanliness and retributions parking) to capital expenditures. This research was conducted at the local government of Balikpapan. By using Realization Report from 2004-2013. The result showed that the local tax (hotel tax, restaurant tax, advertisement tax) and and retributions (retributionsi cleanliness and retributions parking) are not positive and significant impact on capital expenditures. Because role in the realization of capital expenditure require substantial budget as it aims to increase the region's assets.

Keywords : Local Revenue, Local Taxes, Local Retributions, Capital Expenditures.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1997 – 1998 Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan pemerintah pusat tidak dapat menjalankan sistem pemerintahan dengan baik. Oleh karena itu Indonesia memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Maka pemerintah daerah tidak diberikan wewenang sepenuhnya dalam menjalankan pemerintahan di daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu sumber daya yang diperoleh daerah sebagian besar diatur oleh pemerintah pusat. Akan tetapi setelah memasuki era otonomi daerah/ reformasi hal tersebut berubah ditandai dengan penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri sumber daya daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah dimulai / dilaksanakan pada tahun 2001.

Desentralisasi fisikal merupakan pemberian sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan oleh daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang –Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 sedangkan dalam pelaksanaannya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pada tahun 2009 terjadi perubahan mengenai Pajak daerah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 yang mengatur pembagian jenis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah. Dalam pajak daerah, daerah hanya boleh memungut pajak yang sesuai dengan jenis pajak yang tercantum dalam Undang – Undang No 28 Tahun 2009. Sedangkan hal yang menyangkut Retribusi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Belanja daerah merupakan hal yang penting untuk meningkatkan pembangunan di daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari Belanja langsung dan Belanja tidak langsung. Belanja langsung merupankan belanja merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

KERANGKA TEORI

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya

pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD akan menyusun Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak yang diterima oleh daerah. Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yaitu Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan yaitu, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

B. Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari Belanja langsung dan Belanja tidak langsung. Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan disebut sebagai belanja tidak langsung. Sedangkan belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

C. Pajak Daerah

Dalam Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 kemudian diubah dengan Undang – Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

D. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah. Dalam Undang - Undang No. 34 Tahun 2000, yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

E. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Penelitian Terdahulu

1. I Putu Ngurah Panji Kartika Jaya & A.A.N.B. Dwirandra (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas dan arah yang berlawanan.

2. Fitria Megawati Sularno dalam Penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) daan Dana Alokasi Umum (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Moodal.

3. Rizanda Ratna Prandita dalam penelitian Pengaruh Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini adalah Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja

Modal. Variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan biaya langsung lainnya daripada untuk membiayai Belanja Modal seperti terlihat pada lampiran Anggaran Belanja.

Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini sebagai berikut :

H_a : Diduga realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap realisasi Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah statistik kuantitatif , dengan jenis *time series data* dan *crosss section data* (data panel) dalam bentuk tahunan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain yang bersumber dari :

a. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Balikpapan tahun anggaran 2004 sampai dengan 2013.

b. Data realisasi Belanja Daerah kota Balikpapan tahun anggaran 2004 sampai dengan 2013.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka di perlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulakan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokemen – dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara mengumpulkan / menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data – data yang relevan.

Metode Analisis

A. Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda. Dimana syarat uji regresi adalah data harus memenuhi prinsip BLUE; *Best Linier Unbiased Estimator.* Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka yang diajukan dalam penelitian adalah melakukan pengujian asumsi klasik meliputi : Uji Normalitas , Uji Multikolineritas , Uji Heteroskedasitas, dan Uji Autokorelasi yang masing – masing dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk menguji dalam model regresi, apakah variabel independen dan dependennya memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali (2011:160), jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Yaitu perbedaan antara nilai prediksi dengan skore yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri disekitar nilai means sama dengan nol. Jadi salah satu cara mendeksi normalitas adalah lewat mengamatan nilai residual. Menurut Ghozali (2011:163) uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan apabila tidak hati – hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistic bias sebaliknya. Oleh sebab itu maka dianjurkan selain menggunakan uji grafik dilengkapi juga dengan uji statistic. Uji statistic yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji normalitas residual adalah uji statistic non parametric Kolmogorv-Smirnov (K-S) dan dengan menggunkan grafik *normal probability plot* (P-Plot).

2. Uji Multikolinearitas

Didalam persamaan regresi tidak boleh terjadi multikolinearitas, maksudnya adalah tidak boleh ada korelasi atau hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebas yang membentuk pesaamman tersebut. Jika pada model persamaan tersebut terjadi gejala meltikolinearitas itu berarti sesama variabel bebasnya terjadi korelasi. Multikolinearitas dapat diketahui melalui suatu uji yang dapat mendeksi dan menguji apakah persamaan yang dibentuk terjadi gejala multikolinearitas. Salah satu cara untuk mendeksi multikolinearitas adalah dengan menggunakan atau melihat *tool* uji yang disebut *Variance Inflaction Factor* (VIF). Menurut Algifari (2000. Dalam Wibowo, 2012:87) jika nilai VIF kurang dari 10, itu menunjukan model tidak terdapat gejala multikolinearitas, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan mengorelasikan antar variabel bebasnya, bila nilai koefisien korelasi antar variabel bebasnya tidak lebih besar dari 0,5 maka dapat ditari kesimpulan mode persamaan tersebut tidak mengandung multikoleaniritas.

3. Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali, (2011:110) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Biasanya hal ini terjadi pada regresi yang datanya adalah *time series* atau berdasarkan waktu berkala.

Metode Durbin Watson *test* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu *(frist order autocorrelation)* dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen menurut Ghozali, (2011:111).

Adapun panduan mengenai angka DW (*Durbin Watson)* untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilihat pada tabel DW, dengan pengambilan keputusan sebagai berikut :

a) Jika nilai *DW* berada di antara d_L dan 4-d_L atau d_L<*DW*<4-d_L , maka siginifikansi tidak terdapat autokorelasi.

b) Jika nilai *DW* berada di antara d_U dan d_L (d_U<*DW*<d_L) atau 4 d_L<*DW*<4-d_U , maka siginifikansi tidak dapat disimpulkan.

c) Jika nilai *DW* berada di bawah d_U (*DW*<d_U) atau *DW* berada di atas 4-d_U (*DW*<4-d_U), maka siginifikansi terdapat autokorelasi.

B. Analisis Regresi Berganda

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negative serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam penelitian ini terhadap hubungan dan pengaruh antara : realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Retribusi Parkir Ditepi

Jalan Umum terhadap realisasi Belanja Modal. Adapun analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

   Dalam regresi linear berganda, analisis determinasi digunakan untuk mengetahu prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar prosentase variasi independen yang di gunakan dalam model yang dapat menjelaskan variasi variabel dependen.

   Jika R^2 sama dengan 0, berarti tidak ada sedikutpun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika R^2 sama dengan 1, berarti prosentase sumbang pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan model menjelaskan 100% variasi variabel dependen.

2. Uji Koefisien Korelasi (R)

   Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika nilai semakin mendekati 1 berati hubungan yang terjadi semakin kuat, namun sebaliknya jika nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

3. Analisis *Variance* (Uji F / F *test*)

   Uji F digunakan untuk menganalisa pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama – sama (simultan) terhadap variabel terikatnya. Uji F digunakan untuk membandingkan nilai F hitung dengan F table pada tingkat keyakinan tertentu untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F ini digunakan untuk mengetahui besarnya dampak atau pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Dengan tingkat signifikansi menggunakan = 5% (0,05).

4. Uji Signifikan (Uji t / t *test*)

   Uji t atau uji parsial dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dalam hal ini adalah untuk melihat signifikan dari masing – masing variabel sumber / realisasi Pajak Hotel, variabel Pajak Restoran, variabel Pajak Reklame, variabel Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, variabel Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum terhadap

variabel Belanja Modal. Dengan tingkat signifikansi menggunakan = 5% (0,05).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis

Data Penelitian

Berikut data yang digunakan dalam penelitian, yaitu data Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, dan Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2013.

Tabel 1
Data Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Retribusi Kebersihan, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2004 s.d 2013

Thn	Realisasi					
	Belanja Modal	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Retribusi Kebersihan	Retribusi Parkir
	Y	X1	X2	X3	X4	X5
2004	157,305,210,000	8,650,973,841	4,795,232,372	1,173,658,000	2,579,108,415	1,030,211,500
2005	173,226,326,356	11,191,889,312	6,506,402,112	1,777,029,675	2,647,543,084	1,281,685,500
2006	356,400,250,032	12,264,623,088	8,482,992,292	1,958,111,505	2,368,522,634	1,082,426,500
2007	448,553,425,017	15,088,338,247	9,709,281,259	2,124,032,400	2,356,055,568	890,710,000
2008	422,331,312,585	22,054,263,121	12,163,333,698	2,280,327,780	2,515,103,980	949,832,000
2009	471,115,574,941	24,922,189,259	14,332,538,891	3,070,286,140	2,428,577,829	1,215,826,500
2010	263,753,854,540	27,461,415,387	17,341,332,525	3,112,623,320	1,962,051,432	1,188,966,000
2011	319,912,959,694	33,793,584,643	23,162,838,809	3,878,837,184	727,200,988	1,208,474,500
2012	487,328,413,265	41,125,866,528	35,547,021,132	5,420,616,394	5,904,393,963	1,379,534,000
2013	1,084,138,664,051	47,833,165,346	46,533,755,666	7,127,034,728	7,199,474,048	1,516,650,000

Sumber Data : Dinas Pendatan Asli Daerah dan Badan Perimbangan Keuangan Asli Daerah Kota Balikpapan Tahun 2004 s.d 2013

Untuk mempermudah perhitungan analisis, maka penulis menggunakan rumus Cobb Douglass, dimana nilai sebenarnya harus di Logaritma Natural-kan sehingga masing – masing variable yang diukur dalam penelitian ini datanya diwakili oleh nilai nominal sebagai berikut:

Tabel 2
Nilai Nominal Variabel yang Telah di Logarit Natural-kan

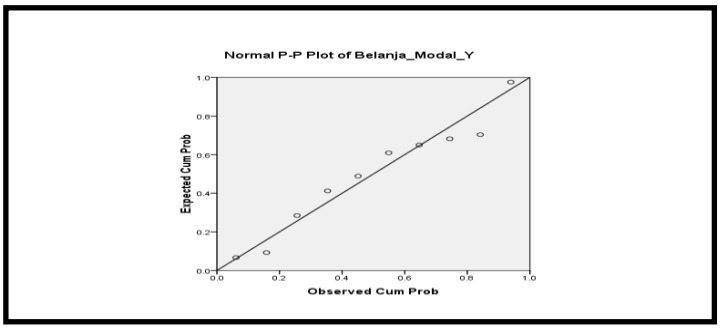
Tahun	Realisasi					
	Belanja Modal	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Reklame	Retribusi Kebersihan	Retribusi Parkir
	Y	X1	X2	X3	X4	X5
2004	25.78145377	22.88093773	22.29088801	20.8833912	21.6707096	20.75302996
2005	25.87786482	23.13845518	22.59605247	21.29820909	21.69689791	20.97144185
2006	26.59932023	23.22998478	22.86132909	21.39524633	21.58553224	20.80247112
2007	26.82929363	23.43718798	22.9963481	21.47658219	21.58025469	20.60752946
2008	26.76905594	23.81677176	23.22169183	21.54758503	21.64557998	20.67179568
2009	26.87836928	23.93902438	23.38579824	21.8450366	21.61057167	20.91868993
2010	26.29828214	24.03604778	23.57635865	21.85873172	21.39725641	20.89634986
2011	26.49131479	24.24353682	23.86581506	22.07880125	20.40471346	20.91262466
2012	26.91220409	24.43990312	24.2941222	22.41347537	22.49896265	21.0450116
2013	27.71180693	24.59098507	24.56344381	22.6871611	22.69727381	21.13976979

Sumber Data : Data yang telah diolah

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

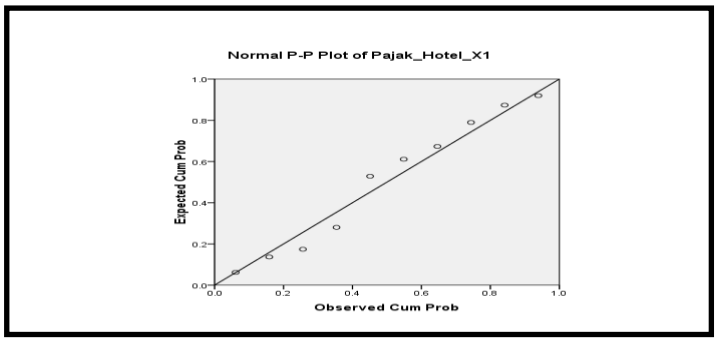
   Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi berganda. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka yang dianjukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi : Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedasitas, dan Uji Autokorelasi sebagai berikut :

   a. Uji Normalitas



Sumber : data diolah dari SPSS

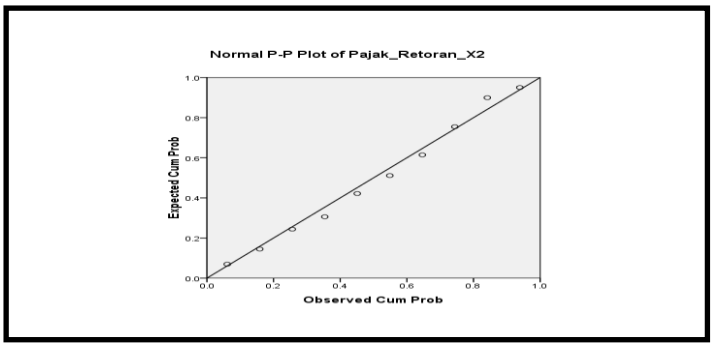
Gambar 1 Gambar P-Plot Untuk Variabel Belanja Modal



Sumber : data diolah dari SPSS

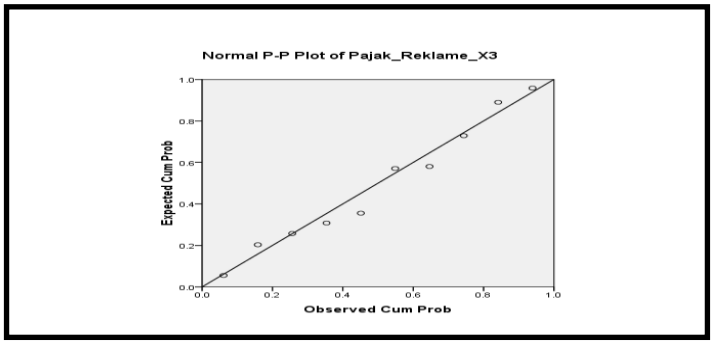
Gambar 2 Gambar P-Plot Untuk Variabel Pajak Hotel

Dari grafik *normal probability plot (P-Plot)* di atas gambar 1 dan Gambar 2 dapat dilihat bahwa sebaran nilai residual untuk variabel belanja modal dan variabel pajak hotel berdistribusi disekitar garis diagonal dan penyebaran titik – titik data residual searah mengikuti garis diagonal. Hal ini mengandung pengertian bahwa variabel belanja modal dan variabel pajak hotel menunjukkan pola yang berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas.



Sumber : data diolah dari SPSS

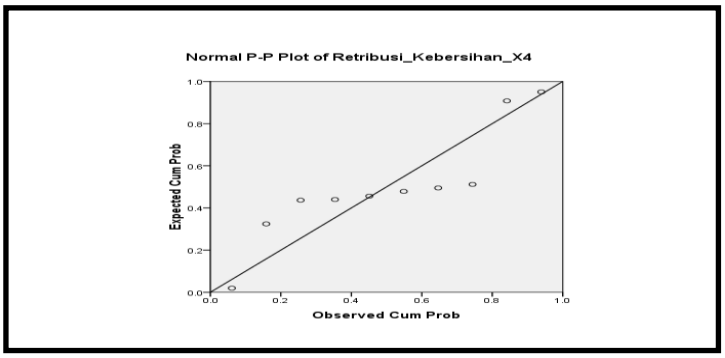
Gambar 3 Gambar P-Plot Untuk Variabel Pajak Restoran



Sumber : data diolah dari SPSS

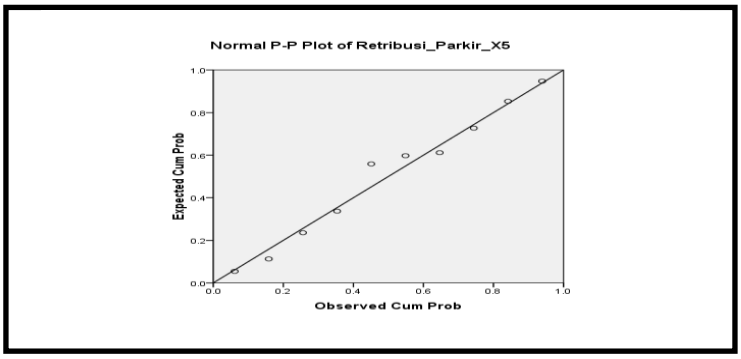
Gambar 4 Gambar P-Plot Untuk Variabel Pajak Reklame

Berdasarkan Grafik *normal probability plot (*P-Plot) Gambar 3 dan Gambar 4 diatas dapat dilihat bahwa sebaran data untuk variabel pajak restoran dan variabel pajak reklame distribusinya membentuk titik-titik yang letaknya menyebar disekitar garis normal.



Sumber : data diolah dari SPSS

Gambar 5 Gambar P-Plot Untuk Variabel Retribusi Kebersihan



Sumber : data diolah dari SPSS

Gambar 6 Gambar P-Plot Untuk Variabel Retribusi Parkir

Berdasarkan Grafik *normal probability plot (*P-Plot) di atas yaitu Gambar 5 dan 6. dapat dilihat bahwa sebaran data untuk variabel retribusi kebersihan dan retribusi parkir dimana distribusinya membentuk titik-titik yang letaknya menyebar disekitar garis normal.

Berdasarkan tampilan grafik P-Plot dari keenam variabel diatas menunjukkan bahwa pola terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu untuk melengkapi dan mempertajam uji grafiknya, maka perlu juga dilakukan uji statistic dengan menggunakan uji statistic non parametric Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang sebagai mana ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Belanja Modal	Pajak Hotel	Pajak Retoran	Pajak Reklame	Retribusi Kebersihan	Retribusi Parkir
N		10	10	10	10	10	10
Normal Parameters[a]	Mean	2.661489656E1	2.377528346E1	2.336518475E1	2.174842199E1	2.167877524E1	2.087187139E1
	Std. Deviation	.5562129545	.5811811502	.7265274154	.5420245506	.6179788462	.1649781098
Most Extreme Differences	Absolute	.196	.128	.099	.145	.288	.159
	Positive	.196	.126	.094	.145	.288	.088
	Negative	-.112	-.128	-.099	-.103	-.237	-.159
Kolmogorov-Smirnov Z		.621	.406	.315	.457	.912	.503
Asymp. Sig. (2-tailed)		.835	.997	1.000	.985	.377	.962

Sumber : data diolah dari SPSS

Dari tabel di atas diperoleh angka probabilitas. Nilai tersebut dibandingkan dengan taraf signifikansi atau $\alpha = 0{,}05$ untuk pengambilan keputusan dengan berpedoman pada :

1) Nilai signifikansi < 0,05 maka distribusi data dikatakan tidak normal.
2) Nilai signifikansi > 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.

Tabel 4
Keputusan Uji Normalitas Data

Variabel Penelitian	Nilai *Asymp.Sig* (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Keputusan
BELANJA MODAL	0,835	0,05	Normal
PAJAK HOTEL	0,997	0,05	Normal
PAJAK RESTORAN	1,000	0,05	Normal
PAJAK REKLAME	0,985	0,05	Normal
RETRIBUSI KEBERSIHAN	0,337	0,05	Normal
RETRIBUSI PARKIR	0,962	0,05	Normal

Sumber : data diolah dari SPSS

b. Uji Multikolinearitas

Dari hasil pengujian model regresi diperoleh hasil untuk masing – masing variabel sebagai berikut :

Tabel 5
Keputusan Uji Multikolinearitas

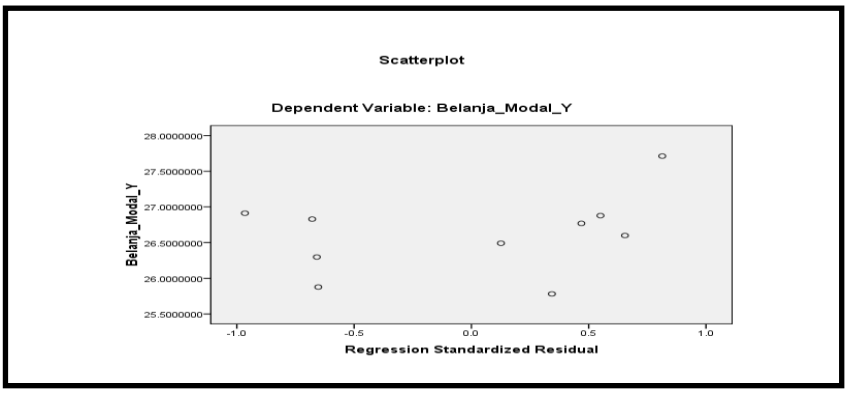
Variabel Independen	*Collinearity* Statistic		Kesimpulan
	Tolerance	**VIF**	
PAJAK HOTEL	0,025	40,145	Terjadi multikolinearitas
PAJAK RESTORAN	0,007	144,280	Terjadi multikolinearitas
PAJAK REKLAME	0,009	109,151	Terjadi multikolinearitas
RETRIBUSI KEBERSIHAN	0,624	1,603	Tidak terjadi multikolinearitas
RETRIBUSI PARKIR	0,312	3,206	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : data diolah dari SPSS

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel independen yang mempunyai nilai VIF yang lebih besar dari 10, yaitu variabel pajak hotel (VIF = 40,145), pajak restoran (VIF = 144.280), dan pajak reklame (VIF = 109,151). Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas antar variabel independen walaupun hanya sebagian dari variabel independen.

c. Uji Heteroskedasitas

Hasil uji heteroskedasitas dapat dilihat melalui grafik yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini :



Sumber : data diolah dari SPSS

Gambar 7 Grafik *Scatterplot* dengan Variabel Dependen Belanja Modal

Berdasarkan gambar 7 di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas dimana titik – titik menyebar dari atas maupun di

bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti terjadi heteroskedasitas dimana variabel independen (pajak hotel, pajak restran, pajak reklame, retribusi kebersihan, dan retribusi parkir) dapat memberikan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu belanja modal.

d. Uji Autokorelasi terhadap Variabel Dependen Belanja Modal

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.949[a]	.900	.775	.2637891024	3.059

Sumber : data diolah dari SPSS

B

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 16.0 dengan menggunakan metode penyesuaian yang membuat kelambanan dari variabel dependennya, maka menghasilkan nilai dari *Durbin-Watson* untuk mendapat kesimpulan dari hasil uji autokorelasi. Di mana nilai Durbin-Watson sebesar **3.059.** Selanjutnya melalui table uji *Durbin-Watson* d_L dan d_U dengan *level of significant* 5% (0,05) diperoleh nilai sebagai berikut :

1) Nilai tabel *DW* untuk d_U (G , k , n) = (0,05 ; 5 ; 10) = 2.822
2) Nilai tabel *DW* untuk d_L (G , k , n) = (0,05 ; 5 ; 10) = 0,243

Karena nilai uji *Durbin Watson* lebih besar dari d_u atau *DW*>4-d_U Maka dapat disimpulkan bahwa nilai *DW* sebesar 3,059 telah terjadi autokorelasi.

2. Hasil Uji Regresi Berganda

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.949[a]	.900	.775	.2637891024	3.059

Sumber : Data diolah dari SPSS

Angka R Square adalah sebesar 0,775. Hal ini mengandung pengertian bahwa variabel Belanja Modal yang dapat dijelaskan oleh variabel dari lima variabel bebas yaitu : variabel Pajak Hotel, variabel Pajak Restoran, variable Pajak Reklame, variable Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dan variable Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum hanya sebesar 77,5% dan sedangkan sisanya 22,5% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

b. Uji Koefisien Korelasi (R)

Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen (X_1,X_2,…..,X_3) secara serempak terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan table 7 di atas diperoleh nilai ***R*** sebesar **0,949** hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara variabel bebas : variabel Pajak Hotel, variable Pajak Restoran, variable Pajak Reklame, variable Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dan variable Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap variabel Belanja Modal.

c. Analisis Variance (Uji F / F *test*)

Tabel 8
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.506	5	.501	7.203	.039[a]
Residual	.278	4	.070		
Total	2.784	9			

Sumber : data diolah dari SPSS

Berdasarkan perhitungan dan analisis data, diperoleh hasil F_{hitung} sebesar **7,203.** Dengan demikian H_o diterima karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau **7,203 > 6,256.** Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, variabel Pajak Restoran, variabel Pajak Reklame, variabel Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dan variabel Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara bersama – sama menpunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

d. Uji Signifikansi (Uji t / t *test*)

Tabel 9
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	43.302	15.832		2.735	.052
	Pajak_Hotel_X1	-.312	.959	-.326	-.325	.761
	Pajak_Retoran_X2	-1.502	1.454	-1.962	-1.033	.360
	Pajak_Reklame_X3	3.644	1.695	3.551	2.150	.098
	Retribusi_Kebersihan_X4	.272	.180	.303	1.511	.205
	Retribusi_Parkir_X5	-2.843	.954	-.843	-2.979	.041

Sumber : data diolah dari SPSS

Uji t digunakan untuk menunjukkan nilai signifikan dari masing–masing koefisien regresi terhadap kenyataan yang ada, yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Pajak Hotel

   Berdasarkan perhitungan dan analisis data sebagaimana tabel 9 diperoleh hasil t_{hitung} sebesar **-0,325.** Dengan demikian H_o diterima karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau **–0,325 > - 2,776.** Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

2. Variabel Pajak Restoran

   Berdasarkan perhitungan dan analisis data sebagaimana tabel 9 diperoleh hasil t_{hitung} sebesar **-1,033.** Dengan demikian H_o ditolak karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau **-1,033 > -2,776.** Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

3. Variabel Pajak Reklame

   Berdasarkan perhitungan dan analisis data sebagaimana tabel 9 diperoleh hasil t_{hitung} sebesar **2,150.** Dengan demikian H_o ditolak karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau **2,150 < 2,776.** Hal ini menunjukkan

bahwa variabel Pajak Hotel, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

4. Variabel Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

   Berdasarkan perhitungan dan analisis data sebagaimana tabel 9 diperoleh hasil t_{hitung} sebesar **1,511.** Dengan demikian H_o ditolak karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau **1,511 < 2,776.** Hal ini menunjukkan bahwa variabel, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

5. Variabel Retribusi Parkir di Tepi Jalan

   Berdasarkan perhitungan dan analisis data sebagaimana tabel 9 diperoleh hasil t_{hitung} sebesar **-2,979.** Dengan demikian H_o ditolak karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau **-2,979 < -2,776.** Hal ini menunjukkan bahwa variabel, Retribusi Parkir di Tepi Jalan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari Hasil Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari 4 (jenis) uji dapat dijelaskan :

a. Uji Normalitas : Bahwa dari keenam variabel yang diuji yaitu veriabel Belanja Modal, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum semua variabel terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas : Bahwa dari kelima variabel independen yang diuji yaitu variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dimana variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame menunjukkan terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame kurang dari 0,10 dan nilai VIF pada variabel tersebut lebih besar dari 10. Sedangkan pada variabel Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *tolerance* variabel Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum kurang dari 0,10 dan nilai VIF pada variabel Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak lebih besar dari 10.

c. Uji Heteroskedasitas : Menunjukkan tidak terjadi heteroskedasitas karena kelima variabel independen yang diuji yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan retribusi parkir ditepi jalan umum dapat mempengaruhi variabel dependenny yaitu variabel belanja modal.

d. Uji Autikorelasi :
Maka dapat disimpulkan tidak terjadi terjadi autokorelasi dengan nilai *DW* sebesar 3,059 atau *Durbin Watson* lebih besar dari 0,05.

Dari Hasil Uji Regresi Berganda dapat dijelaskan :

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2) : Menunjukkan bahwa dari kelima variabel independen yang diuji yaitu variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dapat menjelaskan variabel belanja modal sebesar **77,5%** artinya masih terdapat sisa **22,5%** yang dapat menjelaskan variabel dependennya yang berasal dari luar model.

b. Uji Koefisien Korelasi (R) : Menujukkan hebungan antara variabel dependen dengan variabel independenya sangat kuat yaitu sebesar **0,949**.

c. Analisis *Variance* (Uji F) : Telah dibuktikan dengan hasil uji F ($\alpha = 5\%$) dimana F_{hitung} sebesar **7,203 >** F_{tabel} sebesar **6,256** artinya secara simultan (bersama - sama) antara variabel independen yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal.

d. Uji Signifikansi (Uji t) : Uji ini akan membahas pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

1) Variabel Pajak Hotel : menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel belanja modal.

2) Variabel Pajak Restoran : menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel belanja modal.

3) Variabel Pajak Reklame : menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel belanja modal.

4) Variabel Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan : menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel belanja modal.

5) Variabel Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum : menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel belanja modal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta hipoteisi yang telah disusun dan telah diuji pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulakan pengaruh variabel – variabel independen terhadap variabel dependenya sebagai berikut :

1. Variabel Pajak Hotel : menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini sesuai dengan kodisi dilapangan mengingat perolehan pajak hotel sebagai bagian dari PAD dimana jumlah tidak terlalu besar untuk belanja modal. Hal ini juga dapat disebabkan dalam pengalokasian PAD hanya dapat dialokasikan kedalam belanja daerah hanya untuk membiayai belanja barang dan jasa yang didalamnya untuk menganggarkan belanja yang sifatnya merupakan kegiatan rutinitas pemerintah daerah seperti : biaya fotocopy, pencetakan dan penjilitan, biaya listrik, teleopon dan air, pengadaan alat tulis kantor, dan lain-lain.

2. Variabel Pajak Restoran : menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini sesuai dengan kodisi dilapangan mengingat perolehan Variabel Pajak Reklame : menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini sesuai dengan kodisi dilapangan mengingat perolehan pajak reklame sebagai bagian dari PAD dimana jumlah tidak terlalu besar untuk belanja modal. Hal ini juga dapat disebabkan dalam pengalokasian PAD hanya dapat dialokasikan kedalam belanja daerah hanya untuk membiayai belanja barang dan jasa yang didalamnya untuk menganggarkan belanja yang sifatnya merupakan kegiatan rutinitas pemerintah daerah**.**

3. Variabel Pajak Reklame : menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini sesuai dengan kondisi di lapangan mengingat perolehan pajak reklame sebagai bagian dari PAD dimana jumlah tidak terlalu besar untuk belanja modal. Hal ini juga dapat disebabkan dalam pengalokasian PAD hanya dapat dialokasikan kedalam belanja daerah hanya untuk membiayai belanja barang dan jasa yang didalamnya untuk menganggarkan belanja yang sifatnya merupakan kegiatan rutinitas pemerintah daerah.

4. Variabel Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan : menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel belanja modal. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan merupakan retribusi yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hal ini sesuai dengan kodisi dilapangan mengingat perolehan dari retribusi pelayanan persamphan/kebersian sebagai bagian dari PAD.

5. Variabel Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum : menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel belanja modal. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Parkir Ditepi Jalan umum merupakan retribusi disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Hal ini sesuai dengan kodisi dilapangan mengingat perolehan dari retribusi parkir ditepi jalan umum sebagai bagian dari PAD.

Implikasi

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan ternyata dari kelima variabel independen (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum) tidak ada yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi Belanja Modal pada pemerintah daerah kota Balikpapan. Berdasarkan pengalokasian Belanja Modal untuk melakukan berbagai program atau proyek pemerintah daerah lebih banyak diserap atau dialokasi melalui sumber dana perimbangan, dana alokasi umum ataupun dana alokasi khusus sebab PAD yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah lebih diutamakan untuk dialokasikan untuk Belanja Barang dan Jasa.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh realisasi pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap realisasi belanja modal pada pemerintah daerah kota Balikpapan tahun 2004 sampai dengan 2013. Dampak nyata dari penelitian ini terhadap pemerintah daerah kota Balikpapan adalah membantu menganalisa pengaruh dari pengalokasian sumber pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah kota Balikpapan yang ternyata tidak banyak dipengaruhi oleh suber PAD yang didalam PAD terdapat pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Implikasi langsung dari kewenangan /fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu perlu diatur perimbangan keuangan (hubungan keuangan) antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kebijakan pengalokasian belanja modal sebaiknya lebih besar persentase nya dibandingkan dengan pengalokasian belanja daerah yang bersifat rutin. Belanja modal yang manfaatnya bias dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pembangunan jalan, pembangunan sarana pendidikan , kesehatan menjadi prioritas dalam pengalokasian sarana tersebut.

Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan penelitian, maka penulis mencoba memberikan masukan atau pertimbangan berupa saran sebagai berikut :

1. Mengingat Belanja Modal memerlukan anggaran yang lebih besar dari pada belanja daerah lainnya, maka pemerintah daerah dapat mengalkasikan dari

sumber dana bagi hasil bukan pajak untuk membiayai program atau proyek dalam APBD.

2. Untuk lebih memudahkan sebaiknya pendapatan daerah yang dilamnya termasuk PAD (Pajak dan Retribusi) agar sejak awal proses penganggaran sudah dijelaskan sumber dana untuk membiayai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah yang merupakan PAD yang diterima daerah untuk pembangunna daerah agar dapat bersaing dengan daerah lain, di mana dalam penggunaannya harus sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Dalam melakukan realisasi belanja daerah ada baik bahwa pemerintah daerah meninjau terlebih dahulu maksudnya yaitu agar pemerintah daerah dapat mendahulukan belaja yang bersifat rutin atau lebih banyak dibutuhkan dalam pelaksaan pemerintah daerah, agar tercipta pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

I Putu Ngurah dan Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pradita, Rizanda R. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Akuntansi UNESA, Vol 1, No 2 (2013).

Sugiyono, 2012. Metodelogi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung : Alfabeta.

Sularno, Fitria M. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaraan Belanja Modal. Skripsi. Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4662).

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).

Wibowo.A.E. 2012. Aplikasi Praktis SPSS Dalam Penelitian. Gava Media.